



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN BENDA YANG MENJADI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

TESIS

**SURYAN
1810622054**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Suryan
NRP : 1810622054
Tanggal : 21 Januari 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Suryan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryan
NRP : 1810622054
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda Yang
Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.
18/PUU-XVII/2019)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2021
Yang menyatakan,



Suryan

PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh :

Nama : Suryan
NRP : 1810622054
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
Ketua Penguji




Dr. Arrisman, SH.,MH
Penguji I



Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH.
Penguji / Pembimbing II



Dekan
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 21 Januari 2021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

SURYAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi jaminan fidusia. *Teori yang digunakan*, adalah teori negara hukum, teori penegakan hokum, dan teori pidana dan pemidanaan. *Metode penelitian*, yang digunakan, adalah metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif. *Hasil penelitian*, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 memberikan dampak yang signifikan dalam permasalahan hukum terhadap jaminan fidusia, khususnya terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya terhadap sertifikat jaminan fidusia, tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun harus dimaknai siapakah yang dinyatakan telah melakukan cidera janji, dan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia akibat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditur, maka jalur pengadilan perdata yang akan dapat menentukan siapa yang dinyatakan wanprestasi, akan tetapi apabila objek jaminan fidusia ternyata telah dialihkan, diperjual-belikan, disewakan atau digadaikan kepada pihak ketiga atau penadah, maka dapat dipastikan debitur tidak dapat menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur secara sukarela, dan bagaimanakah cara menjerat hukum bagi pihak penadah yang objeknya adalah benda jaminan fidusia, sedangkan secara yuridis normatif dalam ketentuan khusus di Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang penadah atau penadahan, sehingga dalam penelitian ini berpadangan hukum perlunya adanya revisi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memuat ketentuan tentang penadahan. *Simpulan*, Dasar tuntutan pidana yang diajukan terhadap debitur dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia adalah Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan jika benda objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia adalah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam 372 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia tidak dapat dipidana, terkecuali objek penadahan berasal dari penggelapan Pasal 372 KUHP yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia dengan didasarkan Pasal 480 KUHP serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada *Judicial Review* eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata kunci: jaminan fidusia, penadahan

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL
CONDITIONERS OF OBJECT TRENDING
GUARANTEE FIDUSIA (Study of Court Decisions
Indonesian Constitution Number 18 / PUU-XVII / 2019)**

SURYAN

ABSTRACT

This study aims to identify and explain about criminal regulation for criminal offenders who transfer fiduciary security based on the provisions of the applicable laws. And to find out and explain about law enforcement efforts against the perpetrator of detention of objects that become fiduciary guarantees. The theory used is the theory of rule of law, theory of law enforcement, and the theory of crime and punishment. The research method used is a juridical analysis method with a qualitative approach. The results of the research, the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18 / PUU-XVII / 2019 on January 6, 2020 had a significant impact on legal issues on fiduciary guarantees, particularly on the provisions of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law which in essence is the fiduciary guarantee certificate. , does not necessarily have executorial power like a court decision having permanent legal force, but it must be interpreted who is found to have committed a breach of contract, and if the debtor does not voluntarily hand over the object of fiduciary collateral due to inability to make payment obligations to the creditor, then the civil court route will be able to determine who is declared in default, but if the fiduciary security object turns out to have been transferred, traded, leased or pawned to a third party or collector, then it can be ascertained that the debtor cannot submit the object of the fiduciary guarantee to the creditor effectively. karela, and how to ensnare the law on fiduciary parties whose object is a fiduciary security object, while juridically normative in the special provisions of the Fiduciary Guarantee Law and in legal consideration of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 there is no single provision that regulates the fiduciary or detention, so that in this research the legal opinion is that there is a need for a revision in the Fiduciary Guarantee Law to contain provisions on detention. Conclusion, The basis for the criminal charges filed against the debtor in terms of transferring or transferring, pawning, renting the object of fiduciary security that has been registered with the fiduciary guarantee agency is Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security and if the object of fiduciary security is not registered with The Fiduciary Guarantee Institution is a general crime as regulated in the 372 Criminal Code. Law enforcement for the detention of fiduciary collateral objects cannot be convicted, with the exception of the object of detention originating from embezzlement of Article 372 of the Criminal Code whose fiduciary guarantee is not registered with the Fiduciary Guarantee Institution based on Article 480 of the Criminal Code and in the Constitutional Court Decision only focuses on the Judicial Review of the execution of the fiduciary guarantee object.

Key words: fiduciary guarantee, containment

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga akhirnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada ;

1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA
2. Yth. Wakil Rektor I, Dr. Anter Venus, MA.,Comm
3. Yth. Wakil Rektor II, Dr. Prasetyo Hadi, SE.,MM.,CFMP
4. Yth. Wakil Rektor III, Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ.,MH
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
6. Yth. Ketua Program Magister Hukum, Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
7. Yth Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH, yang adalah Pembimbing

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ini memang belum sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan, untuk itu kritik atau saran dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka mengembangkan diri penulis sendiri. Seiring dengan ucapan syukur kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga amal baik Bapak/Ibu serta dorongan dan motivasi keluarga dibalas oleh Allah SWT.

Jakarta, 25 Januari 2021

Penulis

Suryan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Teoritis.....	14
1.6 Kerangka Konseptual.....	19
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.8 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Perjanjian.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fiducia.....	34
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	41
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan Objek Jaminan Fidusia.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Pendekatan Penelitian.....	59
3.3 Sumber Data.....	59
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	61
3.5 Teknik Analisa Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Pengaturan Tindak Pidana terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	63
4.2 Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Objek Jaminan Fidusia.....	69
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	82

DARTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	